

Baliho Raksasa di Cibinong Miring, Bikin Cemas Warga

CIBINONG (IM) - Sebuah baliho raksasa yang berada di kawasan Pasar Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, nyaris roboh. Baliho tersebut kondisinya miring dan mengancam keselamatan warga.

Menurut salah satu warga, Osmar (55), baliho tersebut miring akibat hujan angin pada Rabu (14/6). Kondisi itu diperparah dengan bagian pangkal tiang yang memang sudah keropos termakan usia.

“Rusaknya kemarin pas hujan angin. Memang kalau bawahnya sudah keropos. Cuma kalau miringnya kemarin, ini mah harus dibongkar, ngeri,” kata Osmar kepada wartawan, Kamis (15/6).

Dia berharap agar pihak terkait segera memperbaiki baliho tersebut. Karena, tidak menutup kemungkinan kondisinya akan semakin

parah atau bahkan roboh. “Itu makanya cepat dah direspons, udah ada 15 tahun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, pengendara motor Rizky (25) yang melintas juga mengaku khawatir dengan kondisi baliho tersebut. Sebab, kawasan tersebut kerap dia lewati ketika berangkat dan pulang bekerja. “Ngeri juga sih kalau tiba-tiba roboh, apalagi kan beberapa hari lagi hujan deras. Tiap hari saya juga lewat sini, jadi makin ngeri,” ucap Rizky.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DP-KPP) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatmika mengatakan pihaknya segera merespons laporan warga tersebut.

“Segera tindak lanjut sekarang, tadi pagi sudah ke lapangan mau direnovasi segera,” singkat Ajat. ● **gio**

Legislator Sambut Revitalisasi Pasar Jambu Dua Bogor

BOGOR (IM) - Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan, menyambut baik pelaksanaan revitalisasi Pasar Induk Jambu Dua dengan harapan Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) berkomitmen memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jadi semua pihak harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing dengan memegang teguh pada komitmen tersebut. Agar ke depan ini memberikan dampak positif, baik ke pedagang, ke perumda pasar dan ke pendapatan daerah,” ujar Anita.

“Jadi kami minta ini diminimalisir potensi kehilangan pendapatan oleh Perumda PPJ. Karena tidak hanya di Jambu Dua saja, tetapi Plaza Bogor juga akan direvitalisasi tahun ini,” ujar Anita.

Wali Kota Bogor, Bima Arya memastikan bahwa

revitalisasi Pasar Jambu Dua masih sesuai jadwal pengerjaan, sehingga diperkirakan pembangunan akan selesai pada akhir tahun ini.

“Saya cek, Insya Allah sesuai jadwal. Sembat-lambatnya di Desember sudah selesai,” katanya.

Bima menuturkan, penataan pasar secara menyeluruh ini yang dimulai dari pembangunan Pasar Induk Jambu dua ini memiliki keterkaitan dengan pasar lain.

Pasar Induk Jambu Dua yang sebelumnya menampung kurang lebih 300 pedagang juga akan menampung seluruh pedagang di Pasar Bogor.

“Iya jadi nanti di Pasar Bogor ini akan dibongkar di bulan Oktober atau November, kemudian pedagang di sana diberikan opsi untuk pindah ke sini. Jumlahnya sekitar 800-an. Jadi total ada sekitar 1.000-an,” katanya. ● **pra**



TARGET REVITALISASI PASAR TRADISIONAL DI JAWA BARAT

Pedagang sayuran melayani pembeli di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (15/6). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan 25 pasar tradisional direvitalisasi pada rentang waktu tahun 2019 hingga 2023, dan nantinya menjadi pasar yang memiliki SNI dan menerapkan digitalisasi pasar.

DPRD Kota Bogor Dorong Pemkot Beri Perhatian Khusus kepada UMKM

BOGOR (IM) - Ketua DPRD Kota Bogor, Jawa Barat Atang Trisnanto, mendorong ada perhatian khusus pemerintah setempat dan seluruh mitra untuk kemajuan UMKM usai pandemi Covid-19 yang menopang ekonomi selama wabah lebih kurang dua tahun ke belakang. “Permasalahan kemudian adalah ketika hari ini ekonomi sudah mulai membaik, nah kira-kira UMKM ini dapat atensi, dapat kebaikan dan keuntungan enggak dari pertumbuhan ekonomi,” ujar Atang saat menghadiri pelaksanaan program UMKM Jabar Juara di ruang serbaguna gedung DPRD Kota Bogor, Kamis (15/6).

Atang berpesan, jangan sampai nanti ketika ekonomi tumbuh lagi, yang dapat keuntungan perusahaan besar yang ketika pandemi Covid-19 jatuh bangkrut. Tapi ketika ekonomi tumbuh, yang untuk malah perusahaan besar.

Menurut dia, perhatian harus ditunjukkan oleh pemerintah dengan bantuan modal, masih tidak cukup untuk menumbuhkan dan meningkatkan UMKM ke level berikutnya, sehingga dengan adanya program

UMKM Jabar Juara.

Atang berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu mengawal, mendukung dan mendampingi para pelaku UMKM Kota Bogor.

“Menurut saya permasalahan tidak bisa membantu secara keberlanjutan. Karena yang penting hari ini adalah bagaimana mental menghadapi pasar yang kuat, bagaimana inovasi untuk mengalihkan pasar dan bagaimana berjanggar pasar tetap bisa dipertahankan. Apakah melalui pelatihan, pembuatan jaringan, itu kami tunggu masukannya,” tegas Atang.

Atang pun memberikan masukan kepada para pelaku UMKM Kota Bogor yang didominasi oleh produk kuliner, bahwa di masa kini dibutuhkan kolaborasi dari para pelaku UMKM. Hal tersebut bertujuan untuk melebarkan pasar dan target penjualan, disamping perlunya menjaga kualitas dan meningkatkan inovasi agar bisa bersaing di era perdagangan secara terbuka.

“Mudah-mudahan UMKM juara Kota Bogor bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi kuat,” katanya. ● **pra**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



AJANG HELI EXPO ASIA 2023

Pengunjung melihat helikopter yang dipamerkan di ajang Heli Expo Asia 2023 di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (15/6). Pameran yang berlangsung hingga Minggu (18/6) tersebut menghadirkan berbagai model helikopter serta menjadi ajang jual beli helikopter.

BAKAL MENJADI HUTAN KOTA

Duta Besar Korsel Ikut Aktif Reboisasi Lahan Eks TPA Pondok Rajeg

“Kerja sama hutan kota dengan Korindo Foundation ini merupakan titik yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan di dekat Stadion Pakansari, Cibinong. Hutan kota ini kami rencanakan juga ada di kecamatan lain,” tutur Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

CIBINONG (IM) - Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Lee Sang Deok bersama Korindo Foundation dan Plt Bupati Bogor,

Iwan Setiawan melakukan penanaman ratusan batang pohon albasiah di lahan eks TPA Pondok Rajeg Cibinong seluas 9 hektare yang akan

menjadi hutan kota.

“Hari ini, bersama Duta Besar Korea Selatan kami menanam 200 batang pohon albasiah. Ke depan, di lahan eks TPA Pondok Rajeg ini bisa ribuan batang pohon yang akan kami tanam dan menjadi hutan kota,” kata Iwan, Kamis (15/6).

Dia menuturkan, di lahan eks TPA Pondok Rajeg itu nantinya akan dijadikan hutan kota. Penghijauan yang kali ini diikuti Duta Besar Korea Selatan itu berasal dari dana corporate social responsibility (CSR) Korindo Foundation.

“Kerja sama hutan kota dengan Korindo Foundation ini merupakan titik yang kedua, setelah sebelumnya dilakukan di dekat Stadion Pakansari, Cibinong. Hutan kota ini kami rencanakan juga ada di kecamatan lain,” tuturnya.

Iwan berharap, hutan kota tak hanya sebagai ruang terbuka hijau tetapi juga bisa menjadi objek wisata buatan yang mudah diakses masyarakat perkotaan.

“Kami serahkan ke Lurah Ponfok Rajeg dan Camat Cibinong, untuk perencanaan hutan kota menjadi salah satu objek wisata alam atau bua-

tan,” harap Iwan.

Sementara itu, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Lee Sang Deok menuturkan selain dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, penanaman pohon ini juga dalam rangka memperingati 50 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Indonesia.

“Penanaman pohon atau pembangunan hutan kota sangat penting dalam upaya mengantisipasi krisis perubahan iklim, penanaman pohon ini harus dilakukan secara global atau oleh masyarakat internasional,” tutur Lee. ● **gio**

Izin Tak Seragam, Apersi Banten Minta Selaras dengan Kebijakan Pusat

TANGERANG (IM) - Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD Apersi) Provinsi Banten mendesak kepada Provinsi Banten untuk menerapkan perizinan yang seragam selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Ketua DPD Apersi Banten, Safran Edi Harianto Siregar mengatakan salah satu hambatan yang dihadapi anggotanya terkait perbedaan kebijakan penerapan izin Amdal atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kota dan kabupaten di Banten berbeda-beda.

“Seperti di Kabupaten Tangerang sangat berdampak sekali terkait Amdal ini. Di Kabupaten Tangerang perumahan dengan luas lahan lima hektare dengan jumlah unit hanya 300 diwajibkan mengurus izin Amdal,” jelas Safran dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Hal ini disampaikan Safran pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-6 di Hotel Soll Marina Serpong, Banten, pada Rabu (14/6).

Selain dalam rangka melaksanakan amanat AD/ART organisasi, rakerda ini juga membahas program kerja dan sekaligus menam-

pung hambatan dan keluhan yang dihadapi anggota Apersi Banten.

Safran menambahkan, pihaknya pernah mempertanyakan ini ke instansi terkait kenapa bisa berbeda, karena di Kabupaten Serang izin ini tidak berlaku. Dan di Kabupaten Serang izin Amdal ini untuk perumahan dengan luas 25 hektare yang dikenakan Amdal.

“Pertanyaan kita kenapa di provinsi yang sama dan kabupatennya yang berbeda aturannya bisa berbeda. Padahal tadi info dari Ketua Umum DPP Apersi untuk wilayah dan provinsi lain untuk perumahan dengan luas 5 hektare tidak dikenakan Amdal,” papar Safran Edi.

Safran mengakui, banyak anggota Apersi Banten keberatan karena sangat membebani para pengembang.

Dan biaya mengurus Amdal untuk luasan lahan 5 hektare bisa mencapai ratusan juta. Menurutnya lagi, untuk rumah subsidi itu sangat berdampak karena biaya perizinannya sangat mahal sekali.

“Biayanya untuk luasan lahan 5 hektare sekitar Rp500-700 juta. Jadi cukup tinggi. Kalau kita bagikan dengan total unit misalkan

300 unit, hasilnya sangat berpengaruh sekali (membebani), sementara untuk rumah subsidi kan marginnya tidak banyak dan kita sama-sama tahu untuk hal itu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah mengapresiasi kinerja Apersi Banten dalam menyediakan hunian bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Semangat tinggi ini perlu sinergi bersama pemerintah dan stakeholder lainnya.

Namun menurut Junaidi, semangat anggotanya di daerah untuk menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak berbanding lurus dengan kemudahan pemberian perizinan dari pemerintah daerah.

Seharusnya perizinan mengacu kepada aturan yang di pusat, sehingga iklim investasi tetap terjaga. Dimana industri properti sangat berdampak dan berefek kepada sektor industri lainnya.

“Semoga kendala ini cepat terselesaikan dan harus menjadi evaluasi bersama agar industri properti tetap menggeliat dan memberikan dampak positif pada perekonomian,” imbuh Junaidi. ● **pp**



PRODUKSI MAKANAN CRISPY DARI ULAT JERMAN

Pekerja menunjukkan ulat Jerman (Zophobas morio) yang dikeringkan di Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (15/6). Berawal membudidayakan ulat Jerman sejak tahun 2014, peternak ulat yang tergabung dalam Asosiasi Ulat Jerman Tasikmalaya (Asput) berinovasi memproduksi makanan crispy, pakan ikan, burung, dan minyak dari ulat Jerman dengan kapasitas produksi mencapai lima kuital per bulan yang dipasarkan melalui flatfrom dengan omset Rp5 juta hingga Rp10 juta.

Disdukcapil Goes to School/Kota Bogor Bidik 22 Ribu KTP Perdana

BOGOR (IM) - Disdukcapil Goes to School kembali digelar di SMAN 1 Kota Bogor. Tahun ini, sebanyak 22 ribu KTP perdana akan dibuat untuk siswa berumur 17 tahun.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, dari target sebanyak 22 ribu KTP perdana itu Disdukcapil Goes to School sudah mencapai 29 persen.

“Dengan program Disdukcapil Goes to School ini kita memang memberikan perhatian khusus kepada pelajar sebagai pemilik KTP perdana. Kenapa demikian? karena blanko KTP setiap harinya semakin langka,” kata Dedie di SMAN 1 Kota Bogor, Kamis (15/6).

Menurutnya, pembuatan KTP perdana itu menjadi prioritas karena mereka nantinya akan mengurus SIM, urusan perbankan, urusan

pembuatan NPWP, paspor, dan lainnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan menyebutkan, program jemput bola ini memberikan kemudahan kepada siswa-siswi tingkat SMA sehingga mereka tidak perlu meluangkan waktu disaat libur, bolos atau cuti. Program disiapkan berupa perekaman di sekolah sekaligus dilakukan pencetakan.

Ganjar menjelaskan, di wilayah administrasinya terdapat 22.754 anak wajib KTP perdana/pemula. Jumlah tersebut merupakan warga di rentang usia 16-17 tahun.

“Program Disdukcapil Kota Bogor akan terus menerus dilakukan terus sampai akhir tahun, sebelum 14 Februari 2024 atau saat Pemilu dilangsungkan. Karena wajib KTP itu punya hak pilih juga,” jelasnya. ● **jay**

Ada di Kawasan Wisata, Pasar Cisarua Layak Jadi Prioritas Pemprov Jabar

CISARUA (IM) - Legislator DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya yang ikut mengawal anggaran bantuan keuangan (Bankeu) dan revitalisasi, menyebut bahwa Pasar Cisarua layak menjadi program prioritas Pemprov Jawa Barat.

Hal itu karena Pasar Cisarua juga bisa menjadi objek wisata baru, pasar yang di pinggir Jalan Raya Puncak tersebut dikelilingi oleh objek wisata hingga harus dibuat layak dan nyaman, baik bagi warga maupun wisatawan.

“Pasar Cisarua berada di kawasan wisata, hingga layak menjadi prioritas revitalisasi pasar rakyat yang digaungkan oleh Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat,” ujar Asep Wahyuwijaya, kemarin.

Asep Wahyuwijaya yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat tersebut menerangkan dengan besar anggaran yang maksimal, maka Pasar Cisarua kini tak lagi kotor, becek dan kumuh.

“Dengan nilai Bankeu yang besar yaitu Rp 35 miliar, maka revitalisasi Pasar Cisarua pun jadi maksimal. Kini, Pasar Cisarua mulai bersih dan modern,” terang Kang

AW sapaan akrabnya.

Ia pun berharap bahwa Pasar Cisarua yang disebut Pasar Juara, harus bisa menjadi pusat perputaran roda ekonomi, ada kenaikan pendapatan baik untuk pedagang maupun masyarakat sekitarnya.

“Dengan tujuan menjadi Pasar Juara harus menjadi pusat ekonomi, ada kenaikan pendapatan pedagang dan masyarakat sekitarnya, maka program revitalisasi pasar tradisional atau rakyat oleh Pemprov Jawa Barat juga harus dilakukan di kecamatan lain di Bumi Tegar Beriman, seperti Lewuliang, Citeureup, Sukamakmur dan lainnya,” harapnya.

Kang AW melanjutkan bahwa program Pasar Juara di beberapa kota dan kabupaten, desain arsitekturnya di serahkan ke masing-masing daerah oleh Pemprov Jawa Barat.

“Asalkan pasarnya bersih, rapih dan modern, ga apa desain arsitekturnya beda-beda. Semoga Pemprov Jawa Barat punya perhatian lebih dalam pemberdayaan masyarakatnya melalui program revitalisasi pasar tradisional,” lanjut Politisi yang hijrah dari Partai Demokrat ke Partai Nasdem tersebut. ● **gio**